

Kumpulan Tulisan Tentang Sutan Sjahrir

SABAM SIAGIAN



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



- Bab 1 -

PARA PENDUKUNG CITA-CITA SUTAN SYAHRIR

“Syahrir, dalam tulisan-tulisannya maupun dalam tindakan-tindakannya, mencerminkan keyakinannya bahwa kemerdekaan nasional hanya merupakan jembatan untuk tercapainya tujuan perjuangan kebangsaan lainnya yaitu: kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, tekanan dan penghisapan, keadilan dan pembebasan bangsa dari genggaman sisa-sisa feodalisme serta pendewasaan bangsa. Nilai-nilai ini ternyata pada dewasa ini telah mendapat relevansi yang baru”.

Soedjatmoko dalam Kata Pengantar *“Mengenang Syahrir”* (Jakarta, 1980)

Kombinasi antara daya tanggap seorang ilmuwan sejarah dan cara kerja serta gaya penulisan jurnalistik ternyata dapat menghasilkan suatu karya yang amat menarik*)

J.D Legge, guru besar ilmu sejarah di Universitas Monash di Australia, penulis buku: *“Sukarno. A Political biography”* (New York, 1972) telah menulis sebuah monograf – tulisan dengan format yang lebih panjang dan lebih mendalam dibandingkan sebuah esai – mengenai Sutan Syahrir, perdana menteri R.I. pertama (14 November 1945 – 27 Juni 1947).

Legge sebenarnya memfokuskan tulisannya tersebut khusus mengenai sejumlah angkatan muda di Jakarta yang melalui berbagai cara berkenalan dengan tokoh pergerakan dan pemikir politik Indonesia ini selama pendudukan Jepang (1942-1945). Mereka kemudian sepanjang hidup mereka masing-masing mendukung dan mempraktekkan pokok-pokok pemikiran serta cita-cita Bung



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Sjahrir.

Judul monograph tersebut lengkapnya: *“Intellectuals and Nationalism in Indonesia – A Study of the following recruited by Sutan Syahrir in Occupation Jakarta”* diterbitkan oleh Cornell Modern Indonesia Project – Monograph Series (Ithaca, New York, 1988). Harganya AS\$ 8,- dengan tebal buku 167 halaman. Karya seperti yang ditulis profesor Legge ini biasanya digolongkan dalam kelompok studi-studi mengenai pertumbuhan intelektual sebuah bangsa di mana dua bidang ilmu: ilmu politik dan ilmu sejarah saling bersentuhan atau berusaha menjawab, suatu pertanyaan fundamental: Apakah yang menggerakkan bangsa ini? Apakah cita-citanya, prinsip-prinsip apakah yang menjadi pegangannya? Kita cenderung angkat bahu dan tidak menganggap penting jika menghadapi suatu karya mengenai latar belakang dan pertumbuhan intelektual sebuah bangsa karena sifatnya akademik. Tapi bagi sejumlah bangsa di negara-negara berkembang yang memerdekakan dirinya sejak akhir Perang Dunia ke-II, studi-studi demikian sungguh penting artinya. Karena karya-karya demikian sebenarnya menjawab

Suatu tinjauan lengkap mengenai monograf ini minimal harus membicarakan pokok-pokok yang berikut: Siapa Sutan Syahrir, pemikirannya, kepribadiannya dan karir politiknya? Siapa saja kelompok angkatan muda yang menjadi tertarik, baik kepada pemikirannya, maupun kepada penampilan pribadinya ? Bagaimana situasi dan kondisi kemasyarakatan pada tahun-tahun itu (1942-1945) yang merupakan konteks pengenalan dan berkembang menjadi suatu interaksi intelektual antara Bung Syahrir dan kelompok angkatan pemuda tersebut?



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang

Akhirnya, sampai di manakah, kelompok angkatan muda itu yang dewasa ini rata-rata berumur enam puluhan masih tetap mendukung serta memperjuangkan pemikiran dan visi Bung Syahrir dalam konteks sosial-politik masa kini?

Tinjauan yang lengkap dan mendalam demikian agaknya tidak mungkin mengingat keterbatasan ruangan sebuah surat kabar. Namun, beberapa catatan yang meskipun tidak begitu sistematis dalam kerangka beberapa pokok tadi kiranya dapat merangsang penulis lainnya yang lebih kompeten untuk meninjau buku mengenai Bung Syahrir ini dalam terbitan yang lebih cocok.

Pertama-tama, situasi dan kondisi kemasyarakatan pada tahun-tahun pendudukan Jepang itu sebagai konteks pertemuan antara Bung Syahrir dan sekelompok angkatan muda – yang belum tentu saling berkenalan pada mulanya ataupun pada tahun-tahun berikutnya – yang interesting untuk direkonstruksikan.

Runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda dan munculnya tentara Jepang sebagai pemerintah pendudukan pada bulan Maret 1942, sebuah bangsa Asia dengan sikap dan nilai-nilai yang lain sama sekali, dalam proses yang singkat dan mendadak menimbulkan suatu trauma yang sulit dibayangkan dewasa ini. Muncul suatu suasana kevakuman.

Meskipun pada waktu itu penulis masih di sekolah dasar, sebagai penghuni Jakarta, penulis secara samar-samar masih ingat juga suasana kevakuman itu. Bagaimana para pelajar sekolah menengah serta para mahasiswa yang tidak seberapa jumlahnya nampak keliling naik sepeda seperti kehilangan arah. Ada juga yang menjajakan arang dan keperluan rumah tangga. Jumlah mahasiswa (pada waktu itu disebut “student”) masih sedikit, karena pemerintah



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Hindia Belanda ataupun organisasi swasta Belanda tidak mendirikan universitas yang lengkap. Yang ada hanya beberapa perguruan tinggi di bidang ilmu kedokteran, ilmu hukum dan sastra, teknik serta beberapa lembaga akademi.

Persoalan utama bagi angkatan muda itu tentunya, bukan saja bagi mereka yang biasanya menerima kiriman uang sekali sebulan dari orang tua atau keluarga mereka di luar Jawa, tapi juga bagi yang berkeluarga di pulau Jawa, adalah bagaimana mencari nafkah hidup.

Dan apa rencana selanjutnya: meneruskan studi di sekolah-sekolah yang mulai dibuka, tentunya aksentuasinya pada bahasa serta doktrin kemiliteran Jepang? Atau, mencari pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan pendudukan Jepang?

Tapi rupanya ada juga sekelompok angkatan muda dan ini jelas digambarkan dalam tulisan Dr. Legge, yang mondar-mandir dengan sepeda, mencari ide-ide serta gagasan pemikiran baru agar “*masa pancaroba*” yang sedang berkembang dapat dipahami. Dengan demikian, sedikit banyak gambaran mengenai masa depan dapat digoreskan yang akan merupakan sasaran hidup serta pegangan dalam menjalani masa pendudukan Jepang.

Suasana kevakuman dan keresahaan mencari-cari pegangan itulah dilukiskan dalam tulisan Rosihan Anwar, seorang pemuda pelajar dari Sekolah Menengah Lanjutan Belanda di Yogyakarta (yang disebut AMS, jurusan Sastra Barat; para alumni sekolah itu baru-baru ini mengadakan reuni di Yogyakarta, sejumlah nama-nama mereka yang hadir dalam pertemuan yang cukup mengharukan itu muncul juga dalam tulisan Legge) dalam suatu tulisan pada tahun 1942 : “*Radio Masyarakat*”.



Tulisan yang mula-mula dimuat dalam harian “*Asia Raya*” itu kemudian dimasukkan oleh H. B Jassin dalam antologi karya sastra angkatan 45.

“*Radio Masyarakat*” adalah cerita pendek mengenai seorang pemuda yang dalam suasana awal pendudukan Jepang di Jakarta resah mencari pegangan dan naik sepeda ke sana kemari menjumpai orang-orang yang diharapkan dapat merupakan sumber inspirasi.

Soedjatmoko (seorang mahasiswa di Perguruan Tinggi Ilmu Kedokteran di Jakarta pada tahun 1942) yang banyak dikutip oleh Legge berdasarkan beberapa wawancara dan disebut kemudian berkembang sebagai “*the intellectual’s intellectual*” pernah bercerita beda pengalamannya dalam menjumpai Amir Sjarifudin (Harahap) – Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri RI (1945-1948) dan Sutan Syahrir. (Pada bulan Desember 1945, Bung Syahrir menjadi Ketua dan Bung Amir sebagai Wakil Ketua Partai Sosialis).

Bung Amir, yang tamat sekolah lanjutan yang top di negeri Belanda dan mendapat gelar sarjana hukum di Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Batavia (Jakarta), pada pertemuan pertama saja sudah menarik dan memancarkan sikap yang menggairahkan.

Ia langsung bicara mengenai sejarah dan politik dunia serta pemikiran tokoh-tokoh dunia pada waktu itu. Tapi Bung Syahrir, menurut Soedjatmoko, yang tampil dengan celana pendek, senyum lebar dan berkelakar justru menjengkelkan pada mulanya. Dengan nada yang mudah ditafsirkan seperti mengejek, ia bertanya kepada para pemuda yang datang bertamu, kurang lebih demikian: “*Jadi kalian mau belajar politik?*” Dalam bahasa Belanda tentunya, sambil tertawa terkekeh-kekeh.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Pengalaman seorang pemuda lainnya kira-kira pada waktu yang bersamaan, menjelang akhir 1942 atau awal 1943, yang juga disebut dalam tulisan Legge (hl.56) rupanya berbeda sekali. T.B Simatupang, taruna Akademi Militer Kerajaan Belanda (KMA) di Bandung – “*a young man with inquiring mind*”, tulis Legge – setelah ditawan Jepang, dibebaskan berhubung ulang tahun Kaisar Jepang pada akhir April 1942. Ia sementara tinggal di rumah pamannya, Ds. I. Siagian, di Jakarta dan kemudian keliling pulau Jawa untuk menangkap gelombang “*Radio Masyarakat*”.

Ia tiba pada kesimpulan bahwa Jepang dalam menghadapi Amerika Serikat tidak mungkin menang. Legge mengutip konklusi tajam militer muda itu – yang menurut teman sekelasnya di Akademi Militer, Alex Kawilarang, mantan panglima Siliwangi, selalu dipuji oleh seorang instruktur ilmu pasti terapan untuk kalkulasi medan, sebagai “otak brilian”. Menurut Simatupang, tulis Legge: “*If one does not win a war, one loses it*”.

Tapi pertanyaan penting tentunya, jika Jepang kalah, Indonesia Merdeka yang bagaimana akan muncul ? Inilah persoalan yang menggerakkan proses kimia intelektual selama tahun-tahun pendudukan Jepang di Jakarta (“*the ferment of occupation Jakarta*”, menurut Legge, hl. 56)

Dalam konteks itulah pemuda T.B Simatupang mendayung sepedanya ke Jalan Pasar Minggu (Jakarta Selatan), atas anjuran seorang teman, untuk berjumpa dengan seorang yang bernama Sutan Syahrir. Ia ceritakan pada Legge dalam suatu wawancara, pertemuan itu merupakan suatu “*revelation*”.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Ia ingat benar pertemuan pertama dengan Bung Syahrir itu seperti diceritakannya dalam sumbangan tulisannya untuk buku “*Mengenang Syahrir*” (Gramedia, Jakarta 1980) dengan gaya reportase yang hidup:

“Saya tidak ingat lagi segala sesuatu yang kami bicarakan dalam pertemuan itu. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu tetap hidup dalam kenangan saya sebagai pengalaman yang khas. Pengalaman yang membuka horison yang lebih luas bagi saya. Seolah-olah saya diajak untuk melihat segala sesuatu dari puncak sebuah gunung. Sungai, kampung, sawah, jalan-jalan dan pepohonan yang sebelumnya saya lihat dari dekat, sekarang seolah-olah saya tinjau dari ketinggian dan dari sudut yang lain.” (hl. 190).

Kemudian dengan satu kalimat digoreskannya suatu pernyataan hutang budi yang agaknya tidak terbatas pada bidang intelektual saja. Kemungkinan besar kalimat ini menyimpulkan secara padat perasaan mayoritas para pendukung cita-cita Bung Syahrir. T.B. Simatupang menulis dalam buku kenangan itu: “ Saya akan lebih miskin sekiranya saya tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengenal Sutan Syahrir...” (hl. 194).

Pendukung

Tentunya tidak semua para pendukung cita-cita Bung Syahrir seperti diinventarisasikan oleh Dr. Legge dalam suatu daftar yang amat menarik (Appendix A, hal. 141) dapat dicukilkan di sini. Beberapa telah menulis bukunya sendiri, seperti Subadio Sastrosatomo: “*Perjuangan Revolusi*”, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , 1987).



Legge menulis mengenai Subadio sebagai :

“one of the theorists of his generation. A lover of ideological debate, he had no ambition to be a leader in a political or organizational sense but he did aspire, with success , to a position of intellectual and moral leadership.”

(“... salah satu pemikir teori yang mewakili generasinya. Ia gairah melakukan perdebatan tentang masalah ideologi dan tidak mengemban ambisi untuk menonjol sebagai pemimpin baik di bidang politik maupun di bidang organisasi; tapi dia bercita-cita untuk menduduki posisi kepemimpinan pada tingkat intelektual dan moral, hal mana berhasil dicapainya”).

Legge juga mencukilkan profil L.M. Sitorus, selama 1950'an bertahun-tahun menjadi Sekjen Partai Sosialis Indonesia yang disebutnya sebagai seorang *“populist”*, dan secara tidak langsung mengemukakan dugaan bahwa Bung Lintong dari sudut pergaulan agak terasing dari rekan-rekan separtainya.

Tapi Legge menekankan dalam menyusun daftar para pendukung cita-cita Bung Syahrir (ia tidak masukkan teman-teman sepergerakan Bung Syahrir dari tahun tigapuluhan dalam PNI Pendidikan) bukan berarti bahwa mereka itu adalah *card carrying members*. Daftar tersebut merupakan suatu usaha untuk mentrasir, siapa-siapa saja yang selama tahun-tahun pendudukan Jepang, atau segera sesudah pendudukan itu berakhir sekitar Proklamasi Kemerdekaan, berkenalan dengan Bung Syahrir dan tertarik pada pemikiran serta cita-citanya.

Legge menulis mengenai gambaran stereotip kelompok pendukung ini sebagai “para individu yang amat tinggi kadar



intelektualnya, sadar akan kemodernan pandangannya, memiliki suatu pemahaman yang canggih mengenai dunia dan kompleksitasnya, bangga akan ketrampilan teknisnya”, dan seterusnya.

Mungkin teks orisinalnya lebih menarik perumusannya:

“The stereotype of the Syahrir adherent is of a highly intellectual individual, selfconsciously modern in outlook, possessed of a sophisticated understanding of the world and its complexities, possessed too of a pride in technical competence, self assured, and arrogant in attitude to those not belonging to the initiated”.

(“Stereotip pengikut Syahrir adalah seorang individu dengan daya mampu intelektual yang tinggi, secara sadar berpandangan modern, memiliki pemahaman serba canggih tentang dunia dan kompleksitasnya, juga memiliki suatu kebanggaan tentang kompetensi teknis di bidang tertentu, berpedee dengan sikap yang cenderung arogan terhadap mereka yang dianggap bukan “orang kita”). Tapi Legge menambahkan: *“The reality is more complex”.*

(“Realitasnya lebih kompleks”)

Relevansi Baru

Mencermati tulisan ilmuwan sejarah Australia J.D. Legge ini, mau tidak mau seorang pembaca akan menoleh ke belakang dan mengenang lagi tahap awal R.I. Ketika Sutan Syahrir muncul sebagai perdana menteri pada November 1945 – yang masih ada saja menyebutnya sebagai kup terselubung, padahal serah terima dari kabinet lama ke kabinet yang baru didukung dan disaksikan



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang

oleh Presiden Soekarno - dan kelompok angkatan muda ini merupakan motor dan batere intelektual tahap perjuangan tersebut.

Catatan ini tentunya tidak mengurangi penghargaan terhadap peranan kelompok-kelompok lainnya. Tapi berhadapan dengan kekuatan politik dan militer Barat, dan melakukan pemisahan tajam antara tentara pendudukan Inggris yang ingin segera menyelesaikan tugasnya dan tentara serta kekuatan politik Belanda yang ingin memerintah lagi bekas jajahannya - memang memerlukan pandangan luas serta *sophistication* kelompok teman-teman seperjuangan Syahrir ini.

Tapi apa sebenarnya cita-cita Bung Syahrir? Legge dalam suatu bab tersendiri (Chapter V, hal 91 dan seterusnya), mencoba menyimpulkan pandangan-pandangan Bung Syahrir seperti dicerminkan dalam kebijakan politiknya pada tahun-tahun 1945 s/d 1947. Jawaban padat atas pertanyaan tadi agaknya diberikan oleh Soedjatmoko dalam Kata Pengantarnya untuk buku “Mengenang Syahrir: (hal. ix):

“Syahrir, dalam tulisan-tulisannya maupun dalam tindakan-tindakannya, mencerminkan keyakinannya bahwa kemerdekaan nasional hanya merupakan jembatan untuk tercapainya tujuan perjuangan kebangsaan lainnya yaitu: kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, tekanan dan penghisapan, keadilan dan pembebasan bangsa dari genggaman sisa-sisa feodalisme serta pendewasaan bangsa. Nilai-nilai ini ternyata pada dewasa ini telah mendapat relevansi yang baru”.

Persoalan yang menurut hemat penulis mungkin sekarang ini dihadapi oleh para pendukung Bung Syahrir, seperti diinventarisasikan oleh Dr. Legge, apakah mereka menerima bahwa



situasi kondisi realistik sekarang ini masih dapat merupakan wadah untuk mengembangkan cita-cita Bung Syahrir itu?

Jelasnya, karena kita sebagai bangsa telah memantapkan bahwa satu-satunya azas bernegara, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan butir-butir cita-cita Bung Syahrir seperti dirumuskan secara padat oleh Soedjatmoko sebenarnya tersimpul juga dalam sila-sila dari Pancasila – apakah mereka masih merasa terdorong bekerja secara kreatif mengembangkan cita-cita Bung Syahrir dalam wadah yang sekarang ada?

Rupanya persoalan itu juga pernah direnungkan oleh penulis tajuk “Sinar Harapan” dalam sebuah tajuk yang berjudul : “*Apakah Syahrir telah dilupakan ?*” (SH, Jumat, 11 April 1986) Tajuk itu sebenarnya menanggapi tulisan Rosihan Anwar yang disebut juga oleh Legge dalam daftar pendukung Bung Syahrir yang berjudul: “*Syahrir dan Rizal*”, memperingati tepat 20 tahun meninggalnya Sutan Syahrir di Zurich, pada 9 April 1966.

Penulis itu yang nampaknya cukup akrab dengan pemikiran serta tokoh Bung Syahrir – mungkin juga termasuk dalam daftar Dr. Legge ? - mengakhiri tajuknya:

“Bagi kita yang penting sekarang ialah sampai di mana cita-cita Syahrir mengenai kemanusiaan, kebebasan dan keadilan sesuai dengan cita-cita kemanusiaan, kebebasan dan keadilan yang universal mempunyai arti bagi kita dalam rangka pembangunan nasional kita sebagai pengamalan Pancasila. Atas pertanyaan ini, kita memberikan jawaban yang sangat positif”.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Monograf Dr. J.D. Legge ini mengenai perjumpaan antara Sutan Syahrir dan sekelompok angkatan muda yang kemudian menjadi para pendukungnya seyogyanya dapat menjawab persoalan yang akhir-akhir ini agak sering dibicarakan: Apakah relevansi pemikiran Bung Syahrir bagi kita sekarang?

Jawabannya amat tergantung dari kesetiaan dan realisme para pendukungnya, serta juga mereka yang tanpa mengenal Bung Syahrir secara pribadi merasa ikut mendukung cita-citanya, yang melihat bahwa kerangka sosial politik Indonesia dewasa ini cukup memberikan peluang untuk meningkatkan relevansi tersebut.* * *

*) Tulisan ini dimuat dalam harian Suara Pembaruan (Jakarta), edisi 25 Maret 1997 dengan judul “50 Tahun Yang Lalu - Perjanjian Linggarjati Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda”. Telah dilakukan beberapa perbaikan redaksional tanpa merubah substansinya. SSg.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



LAMPIRAN BAB 1:

DAFTAR NAMA-NAMA PARA PENDUKUNG CITA-CITA SUTAN SYAHRIR

Catatan : Dr. J.D Legge mencantumkan lampiran di ujung karyanya yang memuat nama-nama para pendukung cita-cita Bung Syahrir baik yang dikembangkannya selama tahun-tahun pendudukan militer Jepang (1942-1945), maupun selama tahun-tahun kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri RI (1945-1947).

Menurut DR. Legge, daftar nama-nama ini berdasarkan keterangan yang bersangkutan ataupun berdasarkan informasi yang diberikan para sahabat yang bersangkutan. Dia tandaskan bahwa dengan sengaja tidak dimasukkan dalam daftar ini para kader Pendidikan Nasional Indonesia, organisasi pendidikan politik yang dipimpin oleh Moh. Hatta dan Sutan Syahrir pada awal 1930'an sebelum mereka ditahan polisi Hindia Belanda dan kemudian diasingkan. DR. Legge juga terangkan bahwa tidak semua nama-nama yang tercantum dalam daftar ini menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) secara formal. Ia juga tambahkan bahwa beberapa orang yang diwawancarainya, seperti Mochtar Lubis, pemimpin redaksi harian Indonesia Raya, dan Sjafruddin Prawiranegara, pernah Gubernur Bank Indonesia, mengemukakan bahwa meskipun mereka tertarik pada pemikiran dan kepribadian Sutan Syahrir tapi itu bukan berarti bahwa mereka termasuk "grup Syahrir".

Sebagian besar dari tokoh-tokoh yang namanya dicantumkan agaknya sudah meninggal dunia. Yang diketahui masih hidup, antara lain Pak Kemal Idris dan Bung Rosihan Anwar. Ssg.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Andi Zainal Abidin	Imam Slamet Santoso
Hamid Algadri	Soebadio Sastrosatomo
Takdir Alisjahbana	Sudarmo Sastrosatomo
Chairil Anwar	T.B. Simatupang
Rosihan Anwar	Amir Hamzah Siregar
Ali Budiardjo	Sitorus
Boediono	Maria Ullfah Soebadio
Sutomo Condronogoro	Soebianto
Idham	Dr. Sudarsono
Kemal Idris	Soedjatmoko
Muharto Kartodirdjo	Eri Sudewo
Suroto Kunto	Soemarman
Listio	Patok Sunjoyo
Aboe Bakar Loebis	Susilowati
Darmawan Mangunkusumo	Hazil Tanzil
Suyitno Mangunkusumo	Ismail Thaib
Tandiono Manoe	Tan Po Goan
Murdianto	Utaryo
Nugroho	Wibowo
Bagdja Nitidwirya	Daan Yahya
J.B.A.F.Mayor Polak	Ibrahim Yahya
J.Riekerck	Moersjah Zaafril Ilyas
Sanjoto	



- Bab 2 -

SUTAN SYAHRIR TANDA TANGANI PERJANJIAN LINGGAJATI

Pada tanggal 25 Maret 1947, suatu peristiwa yang amat penting terjadi dan memang kemudian ternyata sungguh besar dampaknya bagi perkembangan sejarah modern bangsa Indonesia*). Pada tanggal tersebut di Jakarta (pihak Belanda menyebutnya “Batavia”) ditanda-tangani suatu perjanjian antara Republik Indonesia yang belum berumur 2 tahun dan Kerajaan Belanda. Upacara penanda-tanganan dilakukan di Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara). Perdana Menteri Sutan Syahrir mencantumkan tanda-tangannya mewakili R.I. Dan Willem Schemerhorn, mantan perdana menteri dan Ketua Delegasi Belanda, menanda-tanganinya atas Kerajaan Belanda.

Dokumen itu secara populer dikenal sebagai “Perjanjian Linggajati”, karena konsep akhirnya dirundingkan di tempat peristirahatan Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Keresidenan Cirebon. Kenapa sampai nama asli tempat perundingan itu, “Linggarjati”, kemudian dalam dokumen-dokumen dan pelaporan pers menjadi “Linggajati (tanpa huruf “r”) pernah ditelusuri oleh sejarawan A.B Lopian (baca: *Menelusuri jalur Linggarjati*, Jakarta 1992)

Rasanya masih jelas terbayang di ingatan saya peristiwa tanggal 25 Maret 1947 itu. Sebagai pelajar sekolah menengah saya menonton di depan istana yang sekarang dikenal sebagai Istana Merdeka dengan menyandang sepeda. Kompleks istana adalah



daerah Belanda. Jakarta pada tahun 1947 (sampai menjelang akhir Juli 1947, ketika Belanda melancarkan serangan umumnya yang pertama) seakan-akan terbagi dua, antara daerah Belanda dan daerah Republik. Di sana tinggal dan berkantor Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook.

Pada waktu itu para pengawal istana prajurit Belanda tidak melarang rakyat biasa berhenti dan menonton di trotoar di depan istana, asal saja tidak menyandarkan sepeda di pagar istana. Bangga rasanya melihat para tokoh RI memasuki kompleks istana dalam suasana dan kondisi di mana Jakarta praktis telah merupakan daerah kekuasaan Belanda. Sutan Syahrir, Perdana Menteri dan ketua delegasi RI tiba. Senyum lebarnya ketika menaiki tangga istana dari samping diterangi sinar lampu tampak dari jauh. Apa yang patut di kenang dari sejarah sekitar Perjanjian Linggajati ini, 50 tahun setelah peristiwa penanda-tanganannya? Karakter apakah yang menonjol pada para tokoh RI yang merundingkan perjanjian tersebut, khususnya pada Bung Syahrir, yang mungkin masih dapat merupakan sumber inspirasi bagi kita dewasa ini? Pertanyaan-pertanyaan ini relevan untuk ditonjolkan, karena di kalangan yang kita perkirakan semestinya memiliki kesadaran sejarah politik nasional, rupanya ada yang dihindangi oleh kesan yang cenderung negatif tentang makna Linggajati (tanpa “r” sesuai dengan yang tertera dalam dokumen-dokumen resmi) dan peranan Bung Syahrir.

Namun, proses perkembangan menuju Perjanjian Linggajati itu perlu diuraikan dulu, meskipun secara padat.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Berhak Memerintah

Dua hari setelah Jepang menyerah dan Perang Dunia berakhir di Asia Pasifik pada tanggal 15 Agustus 1945, Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta atas nama bangsa Indonesia. Pada hari-hari berikutnya Republik Indonesia mulai menjelma: UUD disahkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih, bendera dan lagu kebangsaan diresmikan, Kementerian-kementerian dibentuk dan sebuah kabinet tersusun. Sementara itu organisasi perjuangan muncul dimana-mana, bagaikan jamur yang tumbuh sehabis hujan lebat. Perkembangan cepat selama beberapa minggu itu menyatakan kepada dunia luar bahwa Republik Indonesialah yang berhak memerintah di wilayah yang dulunya Hindia Belanda.

Pada tanggal 15 September 1945 sebuah kapal perang Inggris, *HMS Cumberland*, memasuki Teluk Jakarta. Laksamana Sir Wilfred Patterson sebagai panglima skuadron 5 kapal penjelajah AL Inggris memilih *Cumberland* sebagai kapal komandonya. Pada minggu-minggu terakhir Perang Dunia II, pimpinan negara-negara Sekutu memutuskan bahwa yang akan mengambil oper wilayah Asia Tenggara dari pendudukan militer Jepang adalah Inggris, dan bukan Amerika Serikat.

Tapi perpindahan komando antara Jenderal Douglas MacArthur (AS) yang pada Agustus 1947 bemarkas di Manila ke Laksamana Lord Louis Mountbatten (Inggris) yang pada waktu itu bemarkas di Kandy, Sri Lanka makan waktu. Kedua-duanya adalah tokoh militer yang punya ego yang besar. Agaknya peralihan dari AS ke Inggris sebagai pihak Sekutu yang akan menduduki Indonesia wilayah Barat (khususnya Jawa, Madura dan Sumatra) merupakan



perkembangan menguntungkan bagi RI yang masih bayi itu. Tapi perkembangan itu tidak terjadi secara otomatis.

Yang ikut membuntuti kapal penjelajah *Cumberland* adalah sebuah kapal perang Belanda *HMS Tromp*. Di sana berada seorang pejabat tinggi pemerintahan Hindia Belanda, Ch. O van der Plas yang fasih bicara bahasa Indonesia/Melayu, bahasa Jawa dan bahasa Arab. Ketika Hindia Belanda menyerah kepada tentara ekspedisi Jepang pada awal Maret 1942 di Kalijati (Jawa Barat), sekelompok para pejabatnya masih sempat mengungsi ke Australia. Mereka mendirikan pemerintahan di pengasingan dan bermarkas di luar Brisbane. A.l. van der Plas yang juga ditugaskan di markas besar Laksamana Mountbatten sebagai pejabat penghubung.

Pada dasarnya pihak Sekutu mengakui bahwa wilayah Hindia Belanda akan dipulihkan di bawah pemerintahan Belanda. Di sinilah pentingnya peranan penilaian situasi sosial-politik, atau *political intelligence*. Van der Plas mengawatkan kepada Hubertus van Mook yang memimpin pemerintahan darurat Hindia Belanda di Brisbane bahwa penduduk siap menyambut Belanda kembali, asal saja pemuda-pemuda yang “diracuni” propaganda Jepang segera dapat disingkirkan. Ia berpendapat beberapa batalyon pasukan bersenjata dengan pembagian pangan serta pakaian akan menjamin pulihnya pemerintahan Belanda di Pulau Jawa.

Situasi konfrontatif inilah yang dihadapi Inggris sebagai wakil Sekutu : antara RI yang menyatakan kedaulatannya atas wilayah bekas Hindia Belanda, dan pihak Belanda yang menuntut haknya atas wilayah jajahannya berdasarkan kemenangan pihak Sekutu.



Diplomasi Inggris

Ketika Laksamana Mounbatten bertemu dengan Jenderal MacArthur di Manila pada Agustus 1945, ia mengeluh bahwa tugas yang dihadapinya untuk mengambil oper wilayah Indonesia dari pendudukan Jepang dibebani kendala yang besar. Yakni, praktis tidak ada penilaian situasi yang lengkap dan akurat. Ternyata pihak AS belum mengadakan persiapan yang tuntas andai kata mereka yang akan masuk, sedangkan penilaian pihak Belanda kurang dapat dipercaya, menurut pihak Inggris.

Kadang-kadang pada tahap sejarah yang gawat timbul suatu perkembangan yang tidak terduga. Ketika Laksamana Patterson memasuki Teluk Jakarta dengan kapal perang *Cumberland* pada tanggal 15 September 1945, sebuah kapal tunda dari pelabuhan Tanjung Priok mendekatinya. Di geladak bagian depan berdiri seorang perwira Inggris. Letkol Laurens van der Post. Ia kelahiran Afrika Selatan dan mampu berbahasa Jepang. Ketika Singapura diduduki tentara Jepang pada Februari 1942, ia ditugaskan ke Jawa dengan misi mempersiapkan perang gerilya di Jawa Barat. Tapi ia ditangkap di daerah Banten Selatan dan ditawan di utara Bandung. Setelah Jepang menyerah, ia diminta pimpinan tentara Jepang untuk berperan sebagai perwira penghubung.

Seperti diceritakan Laurens van der Post dalam bukunya terakhir yang terbit November tahun yang lalu (*The Admiral's Baby*, London 1996), resikonya amat besar ketika mendekati *Cumberland*. Bagaimana kalau ia ditembak, karena dicurigai sebagai usaha Jepang melancarkan serangan bunuh diri? Dengan tangkas Letkol van der Post menyampaikan signal dengan menggenggam bendera



di kedua belah tangannya : “ *Di sini perwira Inggris, mohon permisi mendekati kapal Anda...*”. Signal di percaya, ia disambut di geladak Cumberland. Dan diterima oleh Laksamana Patterson.

Van der Post telah menyiapkan sebuah laporan yang menguraikan perkembangan sosial politik di pulau Jawa, tidak saja selama 3½ tahun pendudukan Jepang, tapi juga selama dekade tiga puluhan ketika penjajahan Belanda. Singkatnya, van der Post menekankan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan pemerintahan RI yang baru didirikan itu adalah ungkapan arus nasionalisme yang telah lama bergerak di bawah permukaan. Ia akui, pihak Jepang ingin memanfaatkannya selama 3½ tahun, tapi sebaliknya pihak Indonesia juga memaksimalkan peluang itu untuk memantapkan posisinya. “*Mungkin bidannya adalah pihak Jepang, tapi bayinya adalah asli Indonesia*”, komentar van der Post tentang RI yang baru lahir kepada Laksamana Patterson.

Ketika beberapa minggu kemudian, isteri Laksamana Mountbatten datang berkunjung ke Jakarta sebagai tokoh Palang Merah untuk meninjau keadaan tawanan militer dan sipil yang baru dibebaskan Jepang, Patterson minta Letkol van der Post untuk memberikan “kuliah politik” itu. Pada suatu malam, setelah jamuan selesai, Lady Edwina Mountbatten dan sejumlah perwira staf berkumpul di kapal perang *Cumberland*. Van der Post sekali lagi menguraikan sejarah pergerakan kebangsaan di Indonesia, latar belakang Proklamasi Kemerdekaan dan berdirinya RI, sketsa biografi Sukarno, Hatta, Syahrir-Amir Syarifuddin dan pemimpin Indonesia lainnya.

Laksamana Mountbatten dalam biografinya cerita bahwa isterinya setelah mengunjungi Jawa dan Sumatra memberikan laporan tentang



perkembangan di sana berdasarkan uraian Letkol van der Post. Mountbatten memanggilnya ke markas besarnya di Sri Lanka, kemudian mengirimnya ke London untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Clement Attlee. Ia adalah pemimpin Partai Buruh yang baru menang dalam pemilihan umum mengalahkan Winston Churchill dari Partai Konservatif.

Tentu ada berbagai faktor dan masukan yang mempengaruhi perumusan suatu garis kebijakan. Sudah pasti kecuali laporan van der Post, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi diplomasi Inggris di Indonesia antara akhir tahun 1945 sampai pertengahan tahun 1947. Faktor-faktor itu antara lain : berkuasanya pemerintahan Partai Buruh di Inggris, pandangan Laksamana Mountbatten yang progresif, sikap terbuka panglima tentara Inggris di Jawa, Jenderal Sir Philip Christison, dan pembawaan yang simpatik dari beberapa perwira Inggris yang bertugas di Jakarta selama periode tersebut.

Alhasil kita catat beberapa ciri garis kebijakan pihak Inggris selama bertugas sebagai tentara pendudukan mulai akhir tahun 1945 dan selama tahun 1946 (Bintang film Inggris Dirk Bogarde yang pada waktu itu bertugas sebagai perwira intelijens, kemudian menulis novel tentang pengalamannya yang diberi judul dengan nada agak memuji diri sendiri: *A Gentle Occupation*).

Ciri-ciri itu antara lain :

- Tanpa menyangkal secara resmi hak legal Belanda atas jajahannya, misi tentara Inggris terbatas pada melucuti tentara pendudukan Jepang dan menyelenggarakan upacara penyerahan diri mereka secara resmi;



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



- Hanya menduduki beberapa daerah (*bridgeheads*) untuk sementara di pulau Jawa dan pulau Sumatera, tapi tidak bersedia terlibat dalam konflik intern antara pihak Belanda dan Indonesia;
- Untuk sementara pasukan-pasukan Belanda tidak diijinkan mendarat di pulau Jawa dan pulau Sumatra;
- Menganjurkan kepada pihak Belanda dan Republik Indonesia (sebutan formal “Republic of Indonesia” dipergunakan pihak Inggris dalam komunikasi mereka) untuk berunding, serta bersedia menawarkan jasa-jasa baik.

Ciri-ciri tersebut, sungguh jauh berbeda dengan sikap Belanda, yang menganggap RI sebagai bikinan Jepang dan dapat disikat dalam waktu singkat, serta ingin menyeret pemimpin-pemimpin RI itu ke depan pengadilan sebagai “kriminal perang”. Peluang yang diciptakan Inggris itulah yang dimanfaatkan serta dimaksimalkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Diplomasi Bung Syahrir

Tiap revolusi mengandung dinamika politik yang khas. Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir yang sebelumnya adalah Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, menjadi perdana menteri dan mengumumkan susunan kabinetnya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyaksikan serah terima kabinet. (Aneh bahwa masih ada yang menyebut perkembangan ini sebagai kup politik yang tidak konstitusional).

Letkol van der Post amat aktif membina saluran-saluran komunikasi politik antara kabinet Syahrir, markas besar Jenderal Christison dan pihak Belanda.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Sementara itu pertempuran semakin sengit terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang dan Palembang. Pada tanggal 23 Oktober 1945 Jenderal Christison telah mempertemukan tokoh-tokoh RI: Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta, Menlu Subardjo, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, Haji Agus Salim dengan pihak Belanda: Letnan Gubernur Jenderal van Mook, Dr. Idenburg dan CH. O. van der Plas. Van Mook hampir dipecat oleh pemerintahan Belanda, karena dianggap melanggar instruksi supaya jangan jumpa dengan Soekarno yang dianggap sebagai antek Jepang

Dengan dibentuknya kabinet Syahrir, maka kontak-kontak antara pihak Belanda dan RI semakin ditingkatkan. Pada Februari 1946, Inggris menugaskan seorang diplomat senior Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda.

Dari garis awal di mana posisi masing-masing pihak diametral berbeda, lambat laun ditempa suatu kerangka yang diperkirakan dapat menjadi titik temu. Pihak Belanda tidak alergi lagi mengakui eksistensi RI, pihak Indonesia bersikap taktis dan menerima pengakuan RI secara de facto untuk Jawa, Madura dan Sumatra.

Tempat perundingan dipindahkan ke negeri Belanda untuk merampungkan naskah finalnya. Perundingan dilakukan di sebuah puri tua di tempat bernama Hoge Veluwe. PM Syahrir menugaskan Dr. Sudarsono, Suwandi dan A.G. Pringgodigdo sebagai delegasi Indonesia. Tapi perundingan itu gagal melahirkan sebuah perjanjian, antara lain karena Belanda menghadapi pemilihan umum pertama setelah Perang Dunia berakhir. Kabinet PM Willem van



Schermerhorn merupakan pemerintahan sementara, sehingga tidak berani mengadakan perjanjian yang begitu penting.

Tapi kemudian ternyata perundingan Hoge Veluwe itu tidaklah sia-sia. Partai Buruh Belanda gagal mendapat mayoritas dan Schermerhorn diganti oleh Dr. Beel dari partai Katolik sebagai perdana menteri. Schermerhorn malahan ditugaskan memimpin delegasi ke Jakarta untuk berunding dengan pihak RI dengan mandat yang cukup luas berdasarkan surat keputusan Ratu Belanda.

Sedangkan sementara itu kabinet Syahrir dapat mengkonsolidasi posisinya. Dengan demikian perundingan ronde ke dua (yang pada bulan November 1946 menghasilkan suatu naskah perjanjian) dapat diselenggarakan secara lebih sistematis dengan bantuan pihak Inggris yang menugaskan Lord Killearn, Komisaris Tinggi Inggris untuk Asia Tenggara yang berkantor di Singapura, sebagai penengah. (*“Tugas saya hanya menuang minuman,”* katanya berkelakar, *“karena kedua belah pihak berunding dalam bahasa Belanda yang saya tidak mengerti”*). Ronde kedua ini dalam sidang yang diselenggarakan di Lingga(r)jati, keresidenan Cirebon, menghasilkan suatu naskah perjanjian.

Bukan tempatnya disini untuk menguraikan liku-liku perundingan yang menuju tercapainya Perjanjian Linggajati. Naskah perjanjian yang terdiri dari 17 pasal itu diparap pada tanggal 15 November 1946 di gedung Proklamasi di Pegangsaan Timur (sekarang; Jl. Proklamasi) 56. Agaknya pasal 1 yang merupakan batu tonggak penting: *“Pemerintah Belanda mengakui kenyataan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra”*. Jelas, beberapa kelompok di dalam negeri meledak protes dan mengkritik Syahrir habis-habisan. “Merdeka 100% dan mengusir



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Belanda ke laut” - itulah tuntutan mereka. Tapi kalau dianalisa secara tenang (bukan suatu hal yang mudah dalam situasi revolusioner, tapi itulah sumbangan penting Bung Syahrir: selalu berpikir dan menganalisa secara tenang dan dingin), maka 15 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dan berdirinya RI, Belanda mengakui eksistensi RI itu. Suatu prestasi diplomasi yang penting sekali dalam kelanjutan sejarah RI seterusnya.

Banyak Persoalan

Banyak kesulitan sekitar Perjanjian Linggajati. Antara pamarapan pada tanggal 15 November 1946 sampai penanda-tanganan pada tanggal 25 Maret 1947, baik di negeri Belanda maupun intern RI timbul gumpalan kesulitan. Parlemen Belanda memberikan penafsiran sendiri pada perjanjian itu, tapi pihak Indonesia menganggapnya sebagai tidak ada.

Sedangkan intern RI, Presiden Soekarno dan terutama Wakil Presiden Moh. Hatta mempertaruhkan prestise mereka supaya Perjanjian Linggajati diratifikasi oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat yang pada awal RI berperan sebagai DPR).

Juga setelah penanda-tanganan Perjanjian Linggajati timbul berbagai kesulitan, terutama mengenai penanganan masa peralihan sebelum Republik Indonesia Serikat dibentuk. Kalau diteliti lagi dokumen-dokumen resmi mengenai periode itu yang sekarang telah dibukukan di Belanda, kesan saya, sebenarnya kesulitan bukan saja mengenai tuntutan Belanda supaya “suatu angkatan polisi bersama dibentuk yang juga dapat beroperasi di wilayah RI”. Tapi juga soal penanganan bersama hasil ekspor.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Diantara dokumen itu saya menjumpai sebuah memorandum Menteri Keuangan Belanda, Prof. Lieftinck kepada kabinet dengan tembusan ke H.J van Mook pada tanggal 21 April 1947. Ia minta perhatian bahwa situasi keuangan Belanda sudah payah. Ia tekankan bahwa Belanda harus memetik manfaat dari Perjanjian Linggajati dengan mendesak berdirinya rezim ekspor dan lembaga devisa yang disentralisir (jadi berlaku baik untuk RI maupun daerah yang dikuasai Belanda). Dengan demikian Belanda dapat memanfaatkan daerah produksi di wilayah RI dan ekspor karet dan gula yang masih menumpuk di beberapa daerah. (Intelijen Belanda cukup tajam mengenai lokasi persediaan itu).

Akhirnya gumpalan persoalan itu tidak dapat diatasi lagi. Konsesi PM Syahrir pada akhir Juni 1947 kepada pihak Belanda disalah-tafsirkan di Yogya oleh teman-teman politiknya sendiri. Kabinet Syahrir jatuh, dan rekannya seperti (Partai Sosialis) Amir Syarifuddin menjadi perdana menteri.

Tapi dinamika menuju konfrontasi militer sudah tidak dapat dihentikan. Pada tanggal 21 Juli 1947 pihak Belanda melancarkan serangan umum dengan tujuan resmi memaksa RI “mematuhi Perjanjian Linggajati”. Pada pagi hari itu Bung Syahrir berhasil terbang dari Yogyakarta, ibu kota perjuangan RI, menuju Singapura, New Delhi, Kairo dan akhirnya ke New York, A.S.

Bung Syahrir menumpang sebuah pesawat Dakota yang dikirim oleh P.M. Jawaharlal Nehru dan dikemudikan oleh teman pribadinya, Patnaik. Dia seorang pengusaha yang sukses. Pesawatnya nyaris ditembak pesawat pemburu Belanda ketika mengudara dari lapangan terbang Maguwo (Adi Sucipto), Yogyakarta.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang

Ketika Bung Syahrir tiba di Singapura, pakaiannya hanya yang melekat dibadannya. Suryono Darusman dari kantor Perwakilan RI di Singapura cerita betapa dia membawa Bung Syahrir ke penjahit siap-sehari.

Sebagai utusan khusus khusus RI, Bung Syahrir akan tampil di Dewan Keamanan PBB New York dan perlu setelan pakaian yang pantas (baca, "*Recollections of Suryono Darusman – Singapore and the Indonesian Revolution, 1945-1950*", diterbitkan oleh ISEAS, Singapura 1992)

Berdasarkan perjanjian Linggajati itulah Sutan Syahrir, utusan khusus presiden RI mendapat peluang bicara di Dewan Keamanan di Lake Success pada tanggal 14 Agustus 1947. Apa yang ditakuti Belanda akhirnya terjadi, yakni internasionalisasi konflik RI-Belanda.

Itu hanya mungkin karena Perjanjian Lingga(r)jati yang ditandatangani di Jakarta pada 25 Maret 1947..* * *

*) Tulisan ini dimuat dalam harian Suara Pembaruan (Jakarta), edisi 25 Maret 1997 dengan judul "50 Tahun Yang Lalu - Perjanjian Linggarjati Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda". Telah dilakukan beberapa perbaikan redaksional tanpa merubah substansinya. SSg.



L A M P I R A N A / B A B 2 :

NASKAH PERJANJIAN LINGGAJATI ANTARA KERAJAAN BELANDA DAN REPUBLIK INDONESIA YANG DITANDA- TANGANI DI JAKARTA PADA 15 MARET 1947 (Penulisan disesuaikan dengan EYD)

PEMERINTAH BELANDA, dalam hal ini berwakilkan Komisi Jendral dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia.

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk-bentuk yang baru, bagi kerja bersama dengan suka rela, yang merupakan jaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh-teguhnyanya daripada kedua negeri itu, di dalam masa datang, dan yang membukakan jalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan mupakat seperti berikut, dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran daripada majelis-majelis perwakilan rakyatnya masing-masing.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra.

Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak dan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu, supaya selambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia-Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa, jika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusyawarahkan dengan lain-lain bagian daerah pun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk ke dalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Kerajaan Belanda.

Pasal 4

(1) Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo (Kalimantan) dan Timur-Besar (Sulawesi, NTT, NTB dan Maluku, yang kemudian dikenal sebagai NIT (Negara Indonesia Timur), yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada suatu bagian daerah, untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis, supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.

(2) Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.



Pasal 5

(1) Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentukan negara, yang akan didirikan daripada wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusyawarakat tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung jawab daripada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia, akan bekerja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia, yang dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persekutuan itu, yang terdiri dari satu pihak daripada Kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curacao dan pada pihak lainnya daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Yang tersebut di atas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan dengan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnya.



Pasal 7

(1) Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat; mungkin juga oleh majelis-majelis perwakilan rakyat negara-negara itu.

(3) Adapun yang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerja sama bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan, serta juga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 8

Di puncak Persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah Raja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Raja.

Pasal 9

Untuk membela-pelihara kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negara Belanda, dan kepentingan-kepentingan Kerajaan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Pasal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung juga ketentuan-ketentuan tentang:



- a) pertanggung jawaban hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak menepati kewajiban-kewajiban yang satu kepada yang lain;
- b) hal kewarga-negaraan untuk warganegara Belanda dan warga- negara Indonesia, masing-masing di daerah lainnya;
- c) aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat dicapai semupakat;
- d) aturan cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;
- e) pertanggung jawaban dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan yang dimaksudkan juga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

(1) Anggaran-anggaran itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.

(2) Anggaran-anggaran itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh majelis-majelis perwakilan rakyat kedua belah pihak masing-masing.

Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.



Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaya, setelah terbentuknya Persekutuan Belanda-Indonesia itu dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, yang lagi berada di dalam daerah kekuasaannya de facto. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai dengan bentuk susunan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, agar supaya, sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah persetujuan ini menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan balatenteranya masing-masing. Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang sampai seberapa dan lambat-cepatnya melakukan pengurangan itu; demikian juga tentang kerja-bersama dalam hal ketenteraan.



Pasal 17

(1) Untuk kerja-bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri daripada delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnya, dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, akan menyerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan secara memutuskan, yang diangkat dengan semupakat antara dua pihak delegasi itu, atau, jika tidak berhasil semupakat, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua-dua naskah itu sama kekuatannya.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



LAMPIRAN B/BAB 2

Pidato Perdana Menteri Sutan Syahrir Sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia Pada Upacara Penanda-tanganan Perjanjian Linggajati di Istana Rijswijk di Batavia (Jakarta) pada Tanggal 25 Maret 1947

(Penulisan di sesuaikan dengan EYD)

Sidang yang termulia,

Dengan penanda-tanganan persetujuan Linggajati ini sekarang berlaku satu kejadian yang besar artinya serta akan besar pula akibatnya bagi sejarah bangsa Indonesia.

Masih banyak keragu-raguan, masih banyak kesangsian, masih ada pula curiga terhadap kejadian yang penting ini. Masih kabur bagi orang terbanyak dinegeri ini kita, tempo yang dihadapan.

Masih pahlawan-pahlawan kita berhadapan dengan putera-putera negeri Belanda dengan menggenggam senapan serta alat pembunuh yang lain, memandang satu dengan lain sebagai ancaman diri dan jiwa yang harus dilenyapkan, sebagai musuh yang harus dibinasakan.

Masih ribuan, puluh ribuan orang di negeri kita ini mengandung perih serta dendam dalam hatinya oleh karena saudara kandungnya, ayahnya, ibunya, isterinya, suaminya, harta bendanya, kedudukannya, harapannya, menjadi korban pergolakan sejarah di tanah air kita.



Masih banyak perih masih banyak luka, masih banyak keragu-raguan, masih banyak kesangsian, masih banyak kecurigaan, masih banyak benci, masih mendung dan udara di negeri kita yang indah ini.

Akan tetapi ada pula telah lega, ada pula terdengar dan terasa napas yang menghembuskan sesak dari dada keluar. Ada pula tanda-tanda yang menunjukkan akan jernih dan terangnya jiwa serta udara keliling kita. Tanda-tanda akan kemungkinan melihat kemuka, melihat jauh kalau bisa, tanda-tanda kemungkinan melupakan yang lalu serta memusatkan perhatian serta harapan pada tempo yang dihadapan.

Harapan kita bangsa Indonesia adalah kemerdekaan yang sempurna bagi bangsa kita. Hingga harapan kita itu terasa sebagai ancaman bagi sebagian penduduk negeri kita ini terutama yang berasal dari negeri Belanda. Bagi kita ikhtiar serta perjuangan kita itu menimbulkan serta memupuk perasaan serta keyakinan keharusan berjuang, berkorban, hingga ke menghancurkan rintangan dan lawan yang menghalangi terlaksananya cita-cita, harapan, keinginan serta sebenarnya kebebasan jiwa kita. Kita berhadapan dengan dunia dikeliling kita sebagai kalangan dan rintangan sebagai lawan dan musuh. Ruang hidup serta jiwa kita padat dengan keyakinan serta semangat berjuang dan berkorban. Dunia kita pandang dengan subjectivisme yang absolut.

Suasana pertentangan, suasana perjuangan, suasana sesak meliputi kita, suasana itu pula di dalam diri serta jiwa kita.

Demikian pula bagi mereka di negeri ini yang merasi serta mengalami perjuangan kemerdekaan kita sebagai pengumuman serta perlakuan perang terhadap dirinya. Mereka pun hidup didalam suasana perjuangan dan pertentangan, didalam suasana sesak diluar dan didalam dirinya.

Suasana itu, suasana gelap bagi jiwa hidup didalam suasana itu berarti hidup didalam gelap, akan tetapi di dalam gelap yang panas. Perbuatan yang dilakukan di dalam suasana itu adalah perbuatan yang dilakukan didalam



kegelapan. Kesalahan, kekerasan, pembinasaaan, pembunuhan yang dilakukan didalam suasana itu adalah diperbuat didalam suasana yang gelap.

Demikianlah hendaknya pengertian serta tuntutan tanggung jawab kita pada sekalian kesalahan, perkosaan, pembinasaaan yang berlaku didalam suasana perjuangan, pertentangan, suasana sesak dan gelap itu. Persetujuan yang kita tanda-tangani sekarang ini dimaksudkan sebagai langkah pertama untuk membebaskan kita dari pada suasana sesak ini, langkah pertama di dalam ikhtiar kita menghilangkan kegelapan, serta mengembalikan suasana yang terang dan jernih, mengembalikan suasana yang objektif. Suasana didalam mana pekik “Merdeka” tidak lagi mengancam pada sesama manusia, akan tetapi sebagai pekik kemanusiaan yang dapat pula mengerakkan tiap-tiap manusia yang lain, yang didalam suasana baru yang lega itu, jiwa kemanusiannya, mudah pula tergerak oleh tiap ucapan kemanusiaan.

Dunia penuh dengan pertentangan, penuh dengan bahaya perjuangan, dunia gelap. Di Indonesia kita menyalakan obor kecil, obor kemanusiaan, obor akal yang sehat, yang hendak menghilangkan suasana gelap, suasana pertentangan yang menjadi akibat dari pada serta pula mengakibatkan perkosaan dan pembinasaaan. Suasana sesak gelap.

Marilah kita pelihara obor ini supaya dapat menyala terus serta menjadi lebih terang. Mudah-mudahan akan ia merupakan permulaan terang di seluruh dunia.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Bab 3 -

BUNG SYAHRIR BICARA DI DEWAN KEAMANAN PBB

Pada tanggal 14 Agustus 1947, Sutan Syahrir sebagai utusan khusus RI berhasil bicara di lembaga PBB yang dianggap amat penting, Dewan Keamanan, dalam rangka perdebatan tentang konflik antara RI dan Kerajaan Belanda*). Dewan Keamanan dan Sekretariat PBB pada waktu itu berlokasi di Lake Success, Long Island, kira-kira satu jam dengan kereta api dari Kota New York.

Kenapa Bung Syahrir, yang 1½ bulan sebelumnya meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri RI pertama, sampai berhasil mendapat kesempatan bicara di lembaga tertinggi dunia mewakili RI yang belum berumur 2 tahun, dan hampir saja ambruk karena serangan umum Belanda pada tanggal 21 Juli 1947, merupakan cerita sejarah modern yang patut kita kenang lagi. Cerita yang mencerminkan wawasan politik internasional Bung Syahrir yang serba luas, tapi yang juga menonjolkan heroisme pribadi yang mengesankan.

Operasi “Product”

Pada tanggal 21 Juli 1947, hampir 4 bulan setelah Perjanjian Linggajati antara RI dan Kerajaan Belanda ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal 25 Maret oleh Perdana Menteri RI Sutan Syahrir dan Ketua Delegasi Belanda Prof. Willem Schermerhorn (mantan PM), angkatan bersenjata Belanda melancarkan suatu serangan umum terhadap wilayah RI.

Setelah Inggris, sebagai wakil negara-negara Sekutu, meninggalkan Pulau Jawa dan Sumatera, karena menganggap



tugasnya telah selesai, menjelang akhir tahun 1946, Belanda mengkonsolidasikan kekuatan militernya. Wilayah yang dikuasainya adalah koridor antara Jakarta dan Bandung, sekitar Semarang, sekitar Surabaya, sekitar Medan, sekitar Padang dan sekitar Palembang.

Petunjuk operasional untuk serangan umum itu ditanda-tangani oleh kepala staf umum Tentara Hindia Belanda dan Tentara Kerajaan Belanda (pasukan yang didatangkan khusus dari negeri Belanda berdasarkan keputusan parlemen Belanda), Mayor Jenderal .C. Buurman van Vreeden di Jakarta (pihak Belanda masih menyebutnya: Batavia) pada tanggal 16 Juni 1947.

Tujuan utama dari operasi militer itu, seperti dirumuskan dalam Petunjuk Operasionalnya adalah menduduki wilayah RI untuk mencapai keuntungan ekonomi dalam bentuk hasil perkebunan dan bahan pangan. Mungkin sebagai pencerminan dari sikap kepolosan pihak Belanda, maka nama sandi untuk operasi militer itu adalah: Rencana *Product*.

Faktor apakah yang mendorong pihak Belanda melancarkan serangan umum terhadap wilayah RI pada tanggal 21 Juli 1947 dini hari dan sampai berani (nekad?) mengambil risiko melanggar Perjanjian Linggajati ? Dari kumpulan dokumen Belanda yang pada tahun-tahun itu masih bersifat rahasia, tapi akhir-akhir ini diterbitkan ternyata bahwa faktor ekonomi dan finansial amat memusingkan Belanda. Menteri Keuangan Prof. Lieftinck menyampaikan memorandum yang panjang kepada kabinet Belanda pada tanggal 21 April (hampir sebulan setelah Perjanjian Linggajati ditanda-tangani). Intinya, pihak Belanda harus segera memanfaatkan perjanjian tersebut, antara lain, dengan membentuk sebuah badan



ekspor bersama dan lembaga devisa untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah RI. Hasil perkebunan milik Belanda sebelum perang (1942) yang masih tersimpan di wilayah RI dan diekspor melalui badan bersama tersebut merupakan porsi Belanda.

Lieftinck menekankan dalam memonya itu bahwa situasi keuangan Kerajaan Belanda payah sekali sehingga amat mendesak untuk mengurangi anggaran belanja militernya di Indonesia. Sari memonya itu dikirim kepada ketua delegasi Belanda di Jakarta, Prof.Ir.Schermerhorn. Ia bersikap lebih terus terang, mungkin karena rasa kerekannya ketika Schermerhorn menjadi perdana menteri. Lieftinck menandakan bahwa aparat militer Belanda di Indonesia telah “menelan” dengan lahap devisa yang semakin menciut. Ia juga mengungkapkan kecurigaannya. Menurut pimpinan angkatan bersenjata Belanda di Indonesia, kekuatan seluruh pasukan adalah sekitar 100 ribu.”Tapi dari angka-angka yang kami peroleh dari pihak administrasi militer, pengeluaran keuangan didasarkan atas kekuatan sekitar 220 ribu pasukan?” Ia menyebut pengeluaran itu sebagai “beban” dan mendesak Schermerhorn, supaya perundingan tentang pelaksanaan perjanjian Linggajari dipercepat sehingga : a. pihak Belanda dapat memetik hasil di bidang ekonomi dan keuangan, b. dapat segera mengurangi pasukannya di Indonesia.

Di kalangan Belanda mulai dibicarakan supaya malapetaka finansial jangan sampai terjadi, sedangkan pihak RI tidak bersikap fleksibel mengenai beberapa pokok persoalan, khususnya mengenai pembentukan badan ekspor bersama dan lembaga devisa yang disentralisasi, maka suatu tindakan militer perlu dipersiapkan.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang

Faktor Waktu

Belanda agaknya tiba pada suatu konklusi yang mengkhawatirkan menjelang pertengahan tahun 1947 itu, beberapa bulan setelah perjanjian Linggajati ditandatangani, bahwa faktor waktu tidak menguntungkan pihaknya, malahan merupakan modal yang tidak begitu menonjol bagi Republik. Seorang diplomat AS yang diperbantukan pada Konsulat Jenderal AS di Jakarta (belum ada kedutaan besar pada tahun-tahun itu), Charles Wolf Jr. berkomentar, faktor waktu adalah *a subtle asset* bagi RI yang secara pandai dimaksimalkan oleh PM Sutan Syahrir.

Belanda juga jengkel mengikuti usaha RI membentuk perwakilannya sendiri di beberapa negara dan secara sistematis menggalang simpati dunia internasional. Ia menganggapnya sebagai pelanggaran perjanjian Linggajati. Beberapa hari setelah penandatanganan perjanjian itu, PM Syahrir memenuhi undangan PM Nehru untuk menghadiri Inter-Asian Relations Conference yang diselenggarakan di New Delhi.

Resminya, penyelenggara konferensi adalah Indian Council of World Affairs dan berlangsung mulai 23 Maret sampai 2 April 1947. Bung Syahrir tiba pada hari terakhir konferensi, 2 April 1947. Kehadiran Bung Syahrir di New Delhi menonjolkan reputasinya sebagai negarawan Indonesia dan memperkuat hubungan RI dan India yang ternyata menjadi andalan efektif dalam menghadapi Belanda.

Di antara delegasi Indonesia yang cukup besar itu ikut juga Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim dengan anggota misinya (Nazir St. Pamuncak, Rasjidi dan A.R. Baswedan) yang



ditugaskan ke Mesir dan negara-negara Timur Tengah atas undangan Liga Arab. Misi itu berhasil memperoleh pengakuan *de jure* oleh Mesir untuk RI.

Kegiatan-kegiatan diplomatik ini merupakan perdebatan sengit dalam rapat-delegasi RI dan Belanda pada bulan April dan Mei 1947 mengenai pelaksanaan perjanjian Linggajati. Belanda menganggap RI tidak berhak menyelenggarakan sendiri jaringan hubungan diplomatik, tapi harus menunggu sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, sebagai hasil kerja sama kedua belah pihak. Malahan tanpa diketahui Belanda, PM Syahrir mempersiapkan sebuah misi RI pada Dewan Keamanan PBB untuk mengantisipasi peluang yang diberikan dalam pasal 17 Perjanjian Linggajati.

Pasal itu menyebut cara arbitrase oleh pihak ketiga jika Belanda dan RI tidak dapat mengatasi perselisihan yang timbul mengenai pelaksanaan perjanjian itu. Pada tahap pertama, dikirim Soedjatmoko (pembantu dekat Bung Syahrir) dan Charles Tambu. Ia adalah seorang Sri Lanka, berpendidikan universitas di Inggris dan ikut kelompok Bung Syahrir. Tugas utamanya adalah sebagai *speech writer*.

Untuk mengakhiri kemacetan sekitar pelaksanaan Linggajati, setelah mencatat bahwa faktor waktu tidak menguntungkan, maka Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 menyampaikan memorandum yang panjang kepada RI. Memorandum itu disusun setelah kunjungan Perdana Menteri L.J.M Beel dan Menteri Wilayah Seberang J.A Jonkman yang ingin mengadakan penilaian langsung dan didorong oleh memorandum urgen dari Menteri Keuangan Lieftinck bahwa persediaan devisa Belanda sudah gawat. Untuk



pertama kalinya dalam sejarah kolonialisme Belanda bahwa seorang perdana menterinya mengunjungi wilayah jajahannya yang paling luas.

Memo 27 Mei 1947

Pada tanggal 27 Mei 1947, delegasi Belanda yang dipimpin Willem Schermerhorn menyampaikan memorandum yang disebutnya sebagai “usul-usul terakhir” (mengenai pelaksanaan Linggajati) kepada delegasi RI yang dipimpin oleh PM Sutan Syahrir. Dokumen panjang itu jika disimpulkan berkisar sekitar 4 pokok utama :

- * Segera menangani pembentukan “pemerintahan federal interim” yang memerintah Indonesia sampai didirikannya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949. Karena Kerajaan Belanda masih memiliki kedaultan *de jure*, maka wakil Mahkota mengepalai pemerintah interim itu dan memiliki kekuasaan mengambil keputusan;
- * Semua urusan hubungan luar negeri Indonesia ditangani oleh sebuah Dewan Urusan Luar Negeri yang terdiri dari semua utusan negara-negara bagian, termasuk RI, dan Belanda;
- * untuk menjamin ketenteraman dan memelihara gencatan senjata (yang ditanda-tangani oleh RI dan Belanda pada Oktober 1946) dibentuk sebuah Direktorat Keamanan Dalam Negeri yang terdiri dari pejabat-pejabat sipil dan militer, baik dari pihak Belanda maupun pihak Indonesia. Direktorat itu akan membawahi suatu pasukan polisional bersama, Belanda-Indonesia (*joint gendarmerie*).



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Atas petunjuk Direktorat, pasukan polisional bersama ini mempunyai wewenang bertindak di seluruh wilayah Indonesia (termasuk wilayah RI, SSg)

* Pembentukan suatu Dewan Administratif Ekonomi, di mana ikut duduk Direktur Javasche Bank (bank sirkulasi Belanda di Indonesia). Tugas dewan tersebut adalah menguasai pengaturan impor, ekspor dan persediaan devisa.

Dr. H.J. van Mook, kepala pemerintahan Belanda di Indonesi dan anggota delegasi Belanda, yang menyampaikan memorandum itu menyatakan, jawaban di tunggu dalam waktu 14 hari. Kalau memo itu ditolak, maka perundingan akan dihentikan dan persoalan dikembalikan ke kabinet di Den Haag. Jelas, dokumen itu mengandung nada ultimatum. PM Syahrir mengetahui, berdasarkan percakapannya dengan Menteri Jonkman selama kunjungannya di Jakarta, dan informasi yang diterimanya dari teman-temannya di kalangan perwakilan Inggris (Letkol Laurens van der Post) dan kalangan AS (Charles Wolf Jr.), rupanya Belanda sudah mempersiapkan suatu serangan umum, kalau jawaban atas memo 27 Mei itu dianggap tidak memuaskan.

Bung Syahrir berusaha mengulur waktu dan memberi beberapa konsesi. Ia yakin bahwa faktor waktu adalah di pihak RI. Dalam suatu nota pada tanggal 20 Juni, ia kemukakan RI bersedia mengakui peranan *de jure*wakil Mahkota (Ratu Belanda) selama masa peralihan dan bersedia membicarakan pembentukan Dewan Hubungan Luar Negeri. Mengenai soal ekonomi/perdagangan, ia minta keterangan tambahan. Tapi mengenai “pasukan polisi bersama” dalam pengertian bahwa pasukan Belanda dapat memasuki wilayah RI, itu ditolak.



Namun konsesi-konsesi ini menimbulkan salah sangka di kalangan pendukung politik kabinet Syahrir di Yogyakarta, ibu kota perjuangan RI. Ketika ia kembali dari Jakarta dan tiba di Yogya, 26 Juni, Syahrir dikritik oleh teman-temannya sendiri. Keesokan harinya, ia meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri.

Presiden Soekarno kemudian mengangkat Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri yang juga berasal dari partainya Bung Syahrir, Partai Sosialis. Ia berhasil membentuk kabinet dengan dukungan politik yang tidak begitu mantap.

Bung Amir juga tidak berhasil menggoyahkan posisi Belanda yang tetap berpegang pada Memorandum 27 Mei itu. Waktu masih dapat diulur beberapa minggu, namun akhirnya Belanda melancarkan Operasi *Product*-nya. Pada saat genting ada saja peristiwa positif yang tidak diperkirakan. Meskipun Belanda mulai serangannya pada tanggal 21 Juli 1947 pagi dan menembaki semua lapangan terbang RI, namun sebuah pesawat milik usahawan India, Patnaik yang adalah teman pribadi PM Nehru, dapat lolos dan mendarat di lapangan terbang Maguwo (Adi Sucipto). Besoknya, pagi dinihari ia terbang menuju Singapura dengan penumpang, khusus: Sutan Syahrir, utusan khusus RI.

Sementara itu, India dan Australia minta Dewan Keamanan bersidang, masing-masing menunjuk pada pasal Piagam PBB yang berbeda. Bung Syahrir terbang menuju New Delhi, berembuk dengan sahabatnya Jawarhalal Nehru, kemudian terbang ke Kairo. Mesir sudah mengakui RI secara *de jure* yang amat membantu soal teknis (urusan paspor, saluran kawat, dll). Kemudian bersama-sama Haji Agus Salim mereka menuju ke New York di mana sudah menunggu Soedjatmoko, Dr. Sumitro dan Charles Tambu.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Meskipun Belanda berargumentasi secara gigih dengan melontarkan dalil-dalil hukum internasional yang canggih, akhirnya Dewan Keamanan pada tanggal 12 Agustus memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada utusan RI bicara sebagai salah satu pihak di konflik bersenjata yang sedang berkecamuk di Indonesia. Suatu perjuangan yang intensif dan proses yang berliku-liku telah diselesaikan sebelum Sutan Syahrir bicara pada tanggal 14 Agustus 1947.

Bung Syahrir di DK-PBB

Ruang sidang Dewan Keamanan di gedung sementara PBB di Lake Success, Long Island (bekas pabrik suku cadang pesawat militer selama Perang Dunia ke-II) ketika sidang siang hari pada 14 Agustus 1947 tampak penuh. Di balkon para penonton dan di bagian khusus untuk media pers praktis tidak ada kursi yang kosong. Mata acara sidang : Konflik Belanda dan Indonesia. Presiden Dewan Keamanan untuk bulan Agustus itu adalah wakil tetap Siria, Dubes Faris el-Khouri yang bersikap simpatik terhadap posisi RI dan delegasi Syahrir.

Ketika ia mempersilakan Bung Syahrir bicara, ucapannya tidaklah bernada “obyektif”, seperti diharapkan dari pimpinan sidang. “Sekarang saya persilakan utusan Republik Indonesia bicara yang sudah pasti merupakan sumbangan berharga pada perdebatan ini”, katanya. Ia menyebut “*Indonesian Republic*”, sedangkan Belanda sudah mendesak untuk mempergunakan istilah *parties*, karena RI tidak dianggap sebagai negara berdaulat. Lagi pula, pimpinan sidang sudah menilai pidato Bung Syahrir sebagai “sumbangan berharga”.



Bung Syahrir bicara lebih dari sejam lamanya dalam bahasa Inggris dengan nada yang jelas dan di sana sini, penekanan suara yang lantang. Saya pernah dengar rekaman pidatonya itu di ruang arsip audio, sekretariat PBB di New York. Ia bicara seperti seorang dari Sumatra Utara (ia pernah bersekolah di Medan), dan bukan seorang dari Sumatra Barat. Pada awal pidatonya, Bung Syahrir bicara tentang “*Kerajaan Majapahit yang meliputi kepulauan di Asia Tenggara dan mencakup wilayah dari Papua sampai Madagaskar...Tapi ekspansi cepat dari orang-orang Barat mendorong kemunduran bangsa saya...*”. Ia gambarkan kebangkitan nasionalisme dimulai dengan Budi Utomo pada tahun 1908 dan menekankan bahwa tujuan pergerakan nasionalisme Indonesia selalu mengandung nilai demokratis. Berkali-kali ia sebut dengan nada suara yang khas “*my people*”, bangsa saya.

Dengan sengaja, ia tidak tandaskan pada para anggota Dewan Keamanan bahwa ia sendiri pernah diasingkan selama 8 tahun oleh pemerintahan Hindia Belanda, karena terlibat dalam pergerakan tersebut. Bung Syahrir kemudian mengingatkan sidang bahwa Belanda gagal melindungi rakyat Indonesia dari pendudukan tentara Jepang dan cerita tentang penderitaan rakyat selama 3½ tahun pendudukan militer asing itu. Ia yakinkan sidang bahwa Proklamasi Kemerdekaan dan lahirnya RI bukanlah hasil manipulasi Jepang.

Kemudian dengan panjang lebar, ia uraikan tahap-tahap perundingan dengan pihak Belanda sejak ia menjadi Perdana Menteri RI pada Oktober 1945. Bung Syahrir kritik keras pihak Belanda yang tidak menerapkan pasal 17 Perjanjian Linggajati, yakni “*mekanisme arbitrase*”, tapi melancarkan serangan militer. Dengan nada suara yang mencerminkan kekecewaan pribadinya, Bung Syahrir menyatakan keraguannya atas ketulusan pihak



Belanda yang sementara perundingan masih berlangsung, secara bertahap meningkatkan daya mampu militernya.

Pada akhir pidatonya, ia mengusulkan dua hal : a. Peranan Dewan Keamanan untuk melakukan arbitrase melalui sebuah komisi; b. Pembentukan sebuah Komisi untuk mengawasi gencatan senjata.

Bung Syahrir juga mendesak supaya pasukan Belanda ditarik mundur sesuai dengan garis gencatan senjata yang disepakati kedua belah pihak pada bulan Oktober 1946.

Segera setelah utusan RI itu mengakhiri pidatonya, dua utusan mengangkat tangan dan minta bicara tentang soal prosedur. Utusan Belanda, Dubes Nico van Kleffens minta segera giliran bicara berdasarkan hak jawab, karena katanya ia ingin sampaikan suatu pemberitahuan penting. Utusan Cina (Kuomintang) yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan menyarankan, supaya sidang diakhiri saja, mengingat waktu, dan dilanjutkan keesokan harinya.

Presiden Dewan Keamanan, Dubes Faris el-Khouri dari Siria mengatakan, usul Cina itu memang bijak, “kita semuanya telah letih dan besok kita lanjutkan sidang untuk mendengarkan pidato utusan Belanda”. Palu segera diketoknya.

Dan keesokan paginya media AS memuat pidato Bung Syahrir, kantor-kantor berita dunia melaporkan perdebatan pertama tentang kolonialisme Barat di lembaga tertinggi PBB, tanpa ada sanggahan dari pihak Belanda. Harian *The New York Herald Tribune* (tidak terbit lagi) dalam beritanya, 15 Agustus 1947 menulis antara lain : “(pidato Sutan Syahrir)...merupakan suatu pernyataan yang paling



mengesankan yang pernah kita dengar di Lake Success”....(“...*one of the most moving statements heard here at Lake Success*”).

Keesokan harinya, 15 Agustus 1947, Bung Syahrir jumpa dengan sahabat lama ketika ia belajar di negeri Belanda pada akhir '20-an, seorang teman Belanda dari gerakan sosial demokrat, P.J. Schmidt. Dengan ditemani oleh Haji Agus Salim yang juga mengenalnya, mereka bertiga ngobrol selama berjam-jam.

Schmidt kemudian melaporkan pertemuan itu kepada temannya, ketua fraksi Partai Buruh di parlemen Belanda, Van der Goes van Naters, sama-sama anggota gerakan sosial-demokrat. Schmidt menulis, meskipun Syahrir kecewa terhadap Belanda yang menggunakan kekerasan militer, tapi ia katakan, Indonesia masih bersedia melanjutkan perundingan. Meskipun ia tetap curiga terhadap Van Mook dan Jenderal Spoor, tokoh-tokoh Belanda di Jakarta. Kemudian Schmidt mengadakan penilaian mengenai pidato Syahrir. Ia katakana, Syahrir berhasil menciptakan kesan yang menguntungkan RI di Dewan Keamanan, karena ia menekankan faktor-faktor politis dan psikologis. Dunia setelah Perang Dunia II berakhir cenderung simpati terhadap negara yang lahir karena gerakan nasionalisme yang berlandaskan demokrasi.

Schmidt yang bekerja di Sekretariat PBB mengkritik utusan Belanda, Dubes van Kleffens. Katanya, van Kleffens terlalu menekankan aspek hukum internasional yang meskipun merupakan kuliah yang baik, tapi tidak begitu mengesankan para anggota Dewan, kecuali negara-negara kolonial. Van Kleffens sendiri dalam kawat-kawatnya ke Den Haag mengkritik secara pedas pimpinan sidang.



Dubes Faris el-Khoury disebut sebagai “orang yang penampilannya kelihatannya mengesankan, tapi sebenarnya dia amat licik”. Dalam sidang kabinet Belanda, 16 Agustus 1947, Menteri Jonkman menilai pidato Bung Syahrir sebagai “sikap bermusuhan terhadap Belanda yang dapat ditafsirkan bahwa pihak Belanda telah kehilangan teman dialog yang moderat”.

Pada akhirnya, apa yang diperjuangkan delegasi RI di Dewan Keamanan melalui pidato Sutan Syahrir tidak tercapai sepenuhnya. Dewan Keamanan menerima garis demarkasi seperti situasi di Medan pada tanggal 1 Agustus 1947 dan menugaskan sebuah Komisi Jasa-Jasa Baik yang terdiri dari Belgia (pilihan Belanda), Australia (pilihan RI) dan AS (kesepakatan Belgia dan Australia) untuk menghidupkan lagi perundingan politik antara RI dan Kerajaan Belanda.

Tapi sementara itu konflik Indonesia-Belanda telah mengalami perubahan kualitatif, peranan Bung Syahrir di Dewan Keamanan dan bantuan aktif dari India dan Australia telah mengangkat konflik itu sebagai masalah internasional; tidak lagi melulu soal “dalam negeri”, seperti yang selalu ditanyakan oleh pihak Belanda.* * *

*) Tulisan ini dimuat di harian Suara Pembaruan (Jakarta) dalam edisi Kamis, 14 Agustus 1997. Telah dilakukan beberapa perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi orisinalnya. SSg.



LAMPIRAN BAB 3 :

NASKAH PIDATO SUTAN SYAHRIR, UTUSAN KHUSUS R.I., DI SIDANG DEWAN KEAMANAN PBB DI LAKE SUCCESS, NEW YORK PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 1947 (SESUAI NOTULEN DEWAN KEAMANAN)

The President: I shall now call upon the representative of the Indonesian Republic to make what will certainly be a very valuable statement.

Mr. Syahrir (Indonesia): At the very outset, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I thank The President and the members of the Council for their sense of fair play and justice in granting me the opportunity to participate in the discussions of the Security Council on the Indonesian question.

In my capacity as representative of the Republic of Indonesia, I am going to address the members of this Council on behalf of a country which, for the common people of the occidental world, has only recently come into existence, or even on behalf of a people considered as having just started on the road to nationhood. Such being the case, it may be fitting for me to point out that I am here to represent a people whose history goes back more than a thousand years. In the fourteenth century, my people constituted the Empire of Majapahit which embraced all the islands of South East Asia and extended from Papua to Madagascar. This kingdom had an efficient administration, and – in those days – maintained relations with countries as far distant as China and Europe. In the sixteenth century, my people first came in contact with people of the West. It was most unfortunate that this contact should have taken place at a time when we were on the decline. Western influence began to make



itself felt and kept on increasing in proportion to the rate at which we were falling backward.

The rapid expansion of western power led to the decline and fall of my people, and in this process my country lost its freedom. By this time the Dutch East India Company had established itself. Later, it was transformed into the Dutch Colonial Government and as such, held sway for nearly one-and-a-half centuries. By this time the degradation of my people was complete. These factors must be borne in mind when any evaluation is being made of our relations with the Dutch. It must also be remembered, however, that as a people we have had our own history and traditions-both as a nation and as a State-going back many centuries.

Our history books and the great stone relics scattered about our islands bear evidence of the civilization and culture we achieved in the past. However, under Dutch domination and colonial rule, our history took a tragic turn. Not only did Dutch oppression and exploitation account for our backwardness and degradation, but they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony.

Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, affected us also. At the end of the nineteenth century we began to regain our soul, and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strife and struggle, to become a nation again.

By 1918, our national movement had gained great strength, and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal.



In common with those participating in similar movements in other countries, my people bent all their energies to achieve the status of an independent nation. But as in other countries, the national movement was not popular with colonial rulers. Nationalists were imprisoned and exiled, but the struggle went on. In 1926, the Dutch carried out large-scale military actions against Indonesians. Those taken prisoner who could not be convicted by the courts were sent to the Dutch concentration camps in New Guinea. And as these oppressive measures were carried out against thousands of nationalists all over the wide territory of the Archipelago, it is apparent that opposition to Dutch rule was widespread.

When the Japanese attacked the Netherlands forces in Asia, our national movement had already been in existence for decades in all the islands of the Archipelago. Since 1918 our national movement for freedom has chosen democracy as the goal of the country from among all the current political ideologies. In the Second World War, we placed our reliance on the democracies in their fight against the fascist countries. We accordingly asked the Netherlands Colonial Government to assign our national movement an active role in that war. Our offer, however, was turned down by the Netherlands and thus was destroyed a good chance to bring about a new and better relationship.

At the time when the Netherlands forces were defeated by the Japanese, the Indonesian people was not given a chance by the Dutch to manifest, as a people, what its attitude and desires were in the field of global relations. Eventually we were sacrificed to the might of the Japanese. The result was three-and-a-half years' of misery for my people; and for all that happened during the Japanese occupation the Dutch must be held responsible. Our sufferings were



in no way less thin those of other countries which fell victim to fascist aggression.

During the Japanese occupation, our national movement was continually seeking opportunities to organize itself as a force with which to end Japanese domination. We were convinced that the democracies were bound to win. Our people placed their faith in the promises of the Atlantic Charter; its meaning for us was that we should be set free from colonial domination. The Japanese were keen to win over the nationalists, but our people were bent on the achievement of full nationhood, rejecting each and every kind of alien leadership or tutelage.

When, in the middle of 1945, it was plain that the Japanese were going to lose the war, the Indonesian democratic movement took steps to act for the people and take their future in its own hands. Therefore, it is not the conversation of some Indonesian leaders with the Japanese at Saigon in July 1945 which lies at the root of the constitution of the Indonesian Republic; the birth of the Republic was a result of positive action by the national movement in the country.

It can be proved conclusively that at the time of the conversations at Saigon, and even later, the Japanese had no real intention of setting up any kind of a free Indonesia, let alone the independent Republic of Indonesia. On the contrary, some time before the Japanese surrender, there was every indication that the Japanese were trying to prevent and counteract Indonesian activity towards that end. In February 1945, there was a mutiny of Indonesian troops of the National Voluntary Defence Forces under the Japanese command. Subsequently the Japanese started gradually to disarm all Indonesian troops.



From my own knowledge I can say that the declaration of Indonesian independence, on 17 August 1945, was the work of the democratic movement of which I have spoken. From the big towns down to the smallest villages, the people seized power from the Japanese and handed it over to the Republic. Is there in the course of history any country as democratic as this, where the people, having seized power, handed it over to their government as the lawful authority?

The past twenty-four months have revealed the extraordinary longing and desire of the Indonesian people to set up a peaceful State. The people handed over to the Government the arms they had captured from the Japanese, and thus the Republican-regular army came into existence.

When the Allied forces landed in Indonesia, the people regarded them as friends who had come to liquidate the Japanese occupation. Allied troops were therefore received in all friendliness. The people never for a moment thought that the armed forces of the democracies were going to endanger the freedom of the Republic which the Indonesian people had won for themselves.

Tens of thousands of Netherlands nationals concentrated in camps by the Japanese were not regarded by the Indonesians as enemies. It was only when several hundred Netherlands soldiers who had landed with the British were guilty of various acts of enmity in Batavia that trouble developed with the Indonesians. It was only then that my people began to question and distrust the attitude of the Netherlands towards the Republic.

Tens of thousands of Netherlands internees were still in Japanese concentration camps. When the Netherlands soldiers in Batavia started trouble, the Allied army of occupation became suspect.



Fighting broke out in Soerabaja on a big scale. With the landing of large numbers of Netherlands soldiers in Java, relations deteriorated more and more between the Republic and the Allied army of occupation.

However, even in those circumstances, the young Republic went ahead in its task of achieving peace and security. At the same time it was extending all-out aid to the Allied army of occupation to help it carry out its tasks in Java and Sumatra. During a period of fourteen months the Republic disarmed 70,006 Japanese troops and evacuated them from Republican territory. In addition to this the Republic evacuated more than 30,000 Dutch and other Allied civilian internees. Both these tasks were delegated by the Allied command to the Republican Army.

In a statement to this Council the other day¹, the representative of the Netherlands accused the Republic of holding 700 hostages; but this accusation has no basis in truth. There are no more internees left in Republican territory. The hostages which the representative of the Netherlands has suddenly discovered were never before alluded to or mentioned in official Netherlands statements, either in Indonesia or in the Netherlands.

The work completed by the Republic of evacuating tens of thousands of Japanese prisoners of war, as well as Dutch and Allied civilian internees, provides a good illustration of the discipline and ability of the Republican troops to carry out their appointed duties. It also furnishes an indication of the ability of the Republic itself to implement its undertakings, and of its willingness to do so.

When the Netherlands civilian administration landed in Java in October 1945, there were no Dutch troops there. The whole of Java, Sumatra and Madura was under the complete control of the



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Republican, Government. In spite of the great military advantage the Republic enjoyed, the Republic was willing to enter into negotiations with the Netherlands. From then on, the Republic made repeated attempts to come to an understanding with the Netherlands. The Netherlands, at the start, refused to have any discussions.

Finally, in March 1946, through the active intervention of the United Kingdom Government, there arrived, in Batavia Sir Archibald Clark Kerr, now Lord Inverchapel, who was sent to place his good offices at the disposal of both sides. Thanks to the patience, tact and ability of that British diplomat-and not forgetting the earnest desire of the Republic to come to a settlement with the Netherlands-a draft agreement was finally reached. I, in my capacity as Premier, acted for the Republic; Mr. van Mook, the Netherlands Lieutenant Governor-General, acted for the Netherlands Government.

This draft agreement was ninety per cent the brain-child of Mr. van Mook, but my Government accepted it in order to facilitate a quick settlement. Sir Archibald Clark Kerr, an Indonesian delegation under Mr. Suwandi, and a Netherlands delegation headed by Mr. van Mook left for the Netherlands to get the approval of the Netherlands Government. Mr. van Mook told us when he was leaving for Holland that he would be back in a couple of weeks with the assent of his Government. But the Netherlands cabinet completely ignored the draft agreement. Two months went by before Mr. van Mook returned-with a completely new set of proposals.

After a complete breakdown in the negotiations, and a period of continuous military activity by the ever-increasing Netherlands forces, the time had come for the British army of occupation to leave Indonesia. Accordingly, Lord Killearn, British Special



Commissioner in South East Asia, came to Indonesia to act as mediator in a new attempt to bring both parties to a settlement.

This was in October 1946. Shortly after his arrival, on 14 October, a truce agreement was signed whereby the Netherlands Government undertook not to increase its armed forces in Indonesia beyond the figure of Allied strength on that date, which stood at 91,000 men.

After weeks of patient negotiations between Indonesian and Netherlands representatives, with Lord Killearn in the chair, a compromise was arrived at and the Linggadjati Agreement was initialled by both parties, Indonesian and Netherlands, on 15 November 1946. The Netherlands Commission-General, which had come to Indonesia from the Netherlands to negotiate this agreement, then left for the Netherlands with the intention of coming back before Christmas of the same year.

The Commission-General finally did return to Indonesia, but not earlier than March of this year, four months later. They had not come to sign the Linggadjati Agreement, however. They came with a demand that the Republic should accept the interpretation of the Agreement placed unilaterally upon it by the Netherlands Government. This interpretation is known as the Jonkman interpretation, after the name of the Netherlands Minister for the Colonies. The Republic refused to accept the Jonkman interpretation and, after prolonged haggling, the Agreement was finally signed on 25 March 1947, four months and ten days after the initialing at Linggadjati, on the understanding that the Jonkman interpretation was not to be binding upon the Republic.

In the meantime, the Netherlands had already violated the status quo established by the October truce. Netherlands troops seized and occupied the towns of Buitenzorg and Palembang. They started a



full-scale military action in East Java which culminated in the occupation by Netherlands forces of the Republican towns of Sidoardjo and Krijan. Meanwhile, Netherlands military activity had increased along all perimeters. Simultaneously, the Netherlands maintained an intensive blockade of Indonesian ports.

In this connexion, it will be remembered that an American merchantman, the *Martin Behrman*, proceeded to the Indonesian port of Cheribon with the approval of the United States Department of State in Washington. The ship also received permission from the Netherlands Trade Commissioner in Washington to load cargo at Cheribon. In spite of these undertakings, the Netherlands Colonial Government seized the cargo of the *Martin Behrman* after completion of the loading at Cheribon.

In carrying out this naval blockade, the Netherlands not only prevented the reconstruction and rehabilitation of Indonesia, but went so far as to seize as contraband sorely needed medicines shipped to Indonesia from outside ports. Ships, mostly Chinese owned, plying between Singapore and Indonesian ports, were seized on the high seas outside territorial waters. It was generally recognized that this Netherlands blockade was aimed at strangling the Republic economically.

But this was not all. Two days before the signing of the Linggadjati Agreement on 25 March last, Netherlands forces moved into and occupied the East Java town of Modjokerto. Fighting subsequently flared up in this area, and the consequence of that action was the destruction of property so eloquently described to this Council by the representative of the Netherlands in the afternoon of 31 July.'

In spite of repeated Netherlands violations, and in spite of the occupation of Buitenzorg, Palembang, Sidoardjo, Krijan and



Modjokerto by the Netherlands army, the Republic signed the Linggadjadi Agreement in the sincere belief that Dutch aggression would be brought to an end. It was our hope, that, with the political situation stabilized, we could go ahead with the urgent task of reconstruction and rehabilitation.

One of the points agreed upon between the Netherlands and the Republic when the Linggadjadi Agreement was initialled in November 1946 was that the future State of the United States of Indonesia was to be brought into being by co-operation between the Governments of the Republic of Indonesia and the Netherlands.

Subsequent to this date, however, the Netherlands Colonial Government, without the knowledge or approval of the Republic of Indonesia and in violation of the Agreement, set up the puppet States of East Indonesia and West Borneo, together with other political entities as dependencies of the Netherlands in the Dutch-controlled parts of Indonesia. These creations, it will be clear, were brought into being for the express purpose of using them as bargaining counters against the Republic of Indonesia. Because of this fact, it is not surprising that the representative of the Netherlands has asked this Council to permit officials of these so-called States to be present here to back his statements. These men, however, are representatives of feudal systems which are being perpetuated by the Netherlands. These men are mere officials, appointed by and owing allegiance to the Netherlands Colonial Government.

After the signing of the Linggadjadi Agreement came the question of its implementation. Here it became apparent that the Netherlands Government was adhering to the Jonkman interpretation, which the Republic had rejected as being unilateral. A new crisis developed



and came to a head on 28 May of this year, when the Netherlands issued an ultimatum demanding that the Republic should accept new proposals, evidently based on the Jonkman interpretation of the Linggadjati Agreement.

The Republic replied with a counter-statement dated 7 June, in which the Republic put forward constructive proposals based on the original Linggadjati Agreement.

At this point in the discussions, the representatives of the Netherlands indicated that they were not prepared to negotiate with us any further. As deadlock followed deadlock, the Republic called upon the Netherlands to implement article XVII of the Agreement, which provides for arbitration. These repeated Republican requests were ignored by the Netherlands. By this time, Netherlands military strength had increased by 30,000 above the permitted figure of 91,000, and stood at 120,000. It was apparent that the Netherlands were prepared to make use of their military strength and forced us into a complete surrender. We, on the other hand, anxious to preserve peace at any price, conceded nearly all the Netherlands demands, in spite of their being contrary to the Linggadjati Agreement, except for some very minor points. Included among these was the Netherlands demand for the appointment of a joint constabulary for Republican areas.

On 19 July, we were confronted with another set of demands, including one to the effect that within twenty-four hours all Indonesian troops should withdraw ten kilometres from the positions they then held. At this time, it was common knowledge that the Netherlands had mustered great strength at these very perimeters. The Republic asked for another twenty-four hours in which to consider the matter. This request was refused by the Netherlands.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



On 20 July, the Republican Government, through its Deputy Prime Minister, Mr. Gani, then at Batavia, handed to the Netherlands Colonial Government a written request from the Republic for implementation of article XVII of the Linggadjati Agreement. The Netherlands Colonial Government stated in reply that the Indonesian request had been forwarded to the Netherlands Government in the Netherlands. This was at 8 p.m. on 20 July. At 11 p.m. the same night, one hour before the Netherlands ultimatum expired, Mr. Gani was handed a letter from Mr. van Mook, acting Governor-General, which stated that the Netherlands Government did not consider itself bound any more by the Linggadjati Agreement. It was thus at this juncture that the Netherlands repudiated the Linggadjati Agreement.

Simultaneously, the Netherlands army commenced military operations against the Republic. The Netherlands forces seized all communications facilities and arrested 200 prominent Indonesians in Batavia. Among those arrested was Mr. Gani, who was therefore-apart from the lack of communications facilities-unable to transmit the Netherlands note to the Republican Government in Jogjakarta.

In view of these facts, it appears that the Netherlands Government has never at any time sincerely desired a peaceful settlement with the Republic. On the other hand, all Netherlands action-political, military and economic-was nothing but preparation for aggressive action against its partner in an agreement. Although the Republic has been forced to defend itself, militarily, it still hopes to achieve a settlement by peaceful means. Our Government therefore asked the Security Council to issue the cease-fire order consequence, with the undertaking that the Republic would abide by the Council's decision.



100 Tahun Sutan Sjahrir Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang



Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith, and now that both parties have accepted the Council's order, there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Netherlands troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and also, therefore, to lasting peace. The Republic of Indonesia asks, therefore, that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Netherlands troops from all Republican territories.

In this connexion, I would like to go back to the conditions obtaining in Indonesia shortly after the Republic was set up on 17 August 1945. It is conceded by all impartial observers that law and order reigned throughout the country, that the machinery of government turned over smoothly, and that not a single untoward incident marred the cordial relations existing between different groups of the population.

However, when Netherlands troops began landing in Indonesia the whole picture hanged. The quiet was rudely shattered. Conflict broke out. Law and order were upset, and confusion and disorder increased with the increase in the number of Netherlands troops in Indonesia. Such conflict was inevitable. The Republic states categorically that the possibilities of conflict and interferences with law and order have been many times multiplied by the presence of Netherlands troops in large areas of Republican territory. The Republic also states without qualification that if Netherlands troops are completely removed from Republican territory, conditions will once more be established for a peaceful and orderly life and the maintenance of law and order; and, if this is done, the Republic assures the Security Council that it will hold itself responsible for law and order in all Republican territory.



The Republic can produce responsible witnesses -Dutch as well as others-to show that before the present Netherlands occupation of Republican territory, disorders were present only along the perimeters, where Indonesian and Netherlands troops faced each other. Elsewhere in the Republican territory, life moved along in quiet, peace and security.

The first step towards the restoration of law and order in Indonesia would be the withdrawal of Netherlands troops to the positions allocated to them by the truce agreement of 14 October 1946.

The Republic of Indonesia also asks for a commission to be appointed by the Security Council of the United Nations to proceed immediately to Indonesia to supervise implementation of the Council's order of 1 August for the cessation of hostilities. Troops of the Republic of Indonesia ceased fire unconditionally, but Netherlands troops are still continuing what the Netherlands Colonial Government -calls "mopping-up" operations. In addition, conflicting reports of the situation are emanating from both- sides in Indonesia; and this makes it all the more desirable that there should be present on the spot an authoritative commission appointed by the Security Council to supervise the cessation of hostilities and report its findings to the Security Council, so that the Council will have before it, at all times, impartial and authoritative reports on the day-to-day situation in Indonesia.

Eventually, when the withdrawal of Netherlands troops to the positions assigned them by the truce agreement has taken place, this same commission might report on law and order in those areas recently seized by Netherlands forces in their present campaign. This commission could also suggest the measures to be taken in case of necessity to guarantee that law and order should prevail and ensure the absence of retaliations. In view of this, the Republic of Indonesia asks



the Security Council to conclude its valuable work on the Indonesian question by appointing a commission to arbitrate on all points of dispute between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands as the one and only means of ensuring a peaceful and stable solution of the Indonesian question.

I wish it to be placed on record that my Government has gratefully accepted the offers of both the United States' good offices and the Australian Government's mediation or arbitration as a constructive step towards the setting-up of such a commission.

Once again I reiterate the pledge of the Government of the Republic of Indonesia, as I publicly stated it in New Delhi. It reads: "I am authorized to declare that the Government of the Republic of Indonesia will accept any impartial arbitration, and will abide by decisions of the Security Council with regard to obligations, duties and responsibilities imposed by the United Nations Charter."

On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I tender to The President and the members of the Security Council my thanks for the opportunity given me to speak at this Council.

The President: There are still two representatives who wish to speak.

Mr. Tsiang (China): I wish to raise a point of order. I wonder, in view of the lateness of the hour, if the Chair would not entertain a motion for adjournment. I formally move the adjournment of this meeting of the Council.

The President: I think the representative of the Netherlands can speak at the next meeting of the Council.

[1] See Official Records of the Security Council, Second Year, No. 67, 171st meeting.